

## ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2018 dan 2019)

Jones Ramos, Nur Cahyonowati <sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This research aims to examine the association of the board of commissioner and committee characteristics on risk disclosure. Characteristics of the board of commissioners used in the research are independent commissioners and expertise of the board of commissioners. The characteristics of committees used are audit committee, expertise of the audit committee, and risk management committee. Control variables used include firm size, leverage, and return on equity.*

*The sample of this research contains the manufacture Indonesian firms listed on Indonesia Stock Exchange. This research used 240 annual reports of the sampled firms over two years from 2018 to 2019. The content analysis approach was used to collect data and to determine the level of risk disclosure in the annual reporting. Multiple regression analysis is used to examine the impact of the characteristics of board of commissioners and committees on risk disclosure.*

*The results show that the presence risk management committee has a significant effect on the extent of risk disclosure. The other board and committee characteristics do not have significant influence on risk disclosure. These results indicate that the role of the board of commissioners and committees has not fully explained the ruling mechanism related to the company's risk control and supervision activities.*

*Keywords: Risk Disclosure, Corporate Governance, Board of Commissioners, Committee.*

### PENDAHULUAN

Terjadinya skandal perusahaan besar dan praktik akuntansi curang oleh Enron, WorldCom, dan Xerox yang terkenal, telah menjadi faktor pendorong banyak penelitian yang membahas akan pentingnya pengungkapan risiko. Menurut Cabedo dan Tirado (2004), ramainya skandal dan kolapsnya perusahaan besar diawal tahun 2000-an diakibatkan oleh tidak adanya pengungkapan informasi manajemen risiko didalam pelaporan keuangan. Terjadinya peristiwa tersebut mengakibatkan banyak pemangku kepentingan meningkatkan permintaan akan adanya informasi yang berkualitas tinggi (Miihkinen, 2013). Adanya informasi berkualitas tinggi bertujuan membantu pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan mengetahui keseluruhan risiko perusahaan yang akan mempengaruhi seluruh proses pengambilan keputusan bisnis.

Luas pengungkapan risiko perusahaan yang akurat dan memadai bertujuan meningkatkan transparansi dan mendapatkan kembali kepercayaan pemangku kepentingan melalui informasi pengelolaan risiko didalam laporan keuangan. Keluasan terhadap pengungkapan akan memberikan penjelasan risiko yang jelas, lebih memahami elemen risiko dan pengetahuan kompleksitas lingkungan bisnis didalam perusahaan (Abraham dan Cox, 2007; Cabedo dan Tirado, 2004; Hassan, 2009; Linsley dan Shrivess, 2006; Mousa dan Elamir, 2014). Pemangku kepentingan akan dimungkinkan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat terhadap perusahaan yang mengungkapkan risikonya dengan terbuka. Maka dari itu, sungguh penting mengungkapkan informasi risiko yang dapat diandalkan dan tepat waktu guna menilai operasi bisnis dan kondisi keuangan perusahaan yang sedang berjalan.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

Risiko dimaksudkan sebagai kemungkinan bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi dan berefek buruk terhadap pencapaian tujuan (COSO, 2013). Menurut ICAEW (2011), investor dihadapkan oleh risiko kehilangan uang mereka atas bisnis yang bisa jadi gagal, serta risiko atas terjadinya informasi asimetri karena memiliki informasi lebih sedikit dari manajer. Dalam menangani risiko, investor haruslah memperoleh informasi yang cukup dan melakukan penilaian risiko atas pendekatan mereka masing-masing. Menurut Linsmeier et al. (2002), pengungkapan risiko bagi investor berguna untuk mengurangi ketidakpastian dan perbedaan pemikiran didalam penaksiran pasar perusahaan. Menurut Linsley dan Shrives (2005), elemen-elemen yang harus dicamtumkan untuk mengukur pengungkapan risiko adalah risiko integritas, risiko keuangan, risiko operasional, risiko pemberdayaan, risiko pemrosesan teknologi dan informasi dan risiko strategik. Perusahaan yang telah melakukan pengungkapan risiko yang baik ketika pembaca laporan keuangan memiliki informasi mengenai kesempatan atau prospek, atau bahaya, ancaman atau eksposur, yang telah dialami perusahaan atau mungkin dialami dimasa depan serta pengelolaan dari kesempatan, bahaya, ancaman dan eksposur tersebut (Linsley, Shrives dan Crumpton, 2003).

Pengungkapan risiko dalam perusahaan adalah pelaksanaan praktik tata kelola yang baik. Menurut Daniri (2014), prinsip dasar yang terkandung dalam tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip transparansi menunjukkan laporan keuangan telah menyediakan berbagai informasi yang bersifat material. Prinsip transparansi didalam laporan tahunan akan memberi keyakinan terhadap pengungkapan yang akurat dan tepat waktu atas berbagai hal penting berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan informasi yang memadai, akurat, serta tepat waktu diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan memanfaatkan kesempatan yang berpotensi merugikan pihak lain. Konsep transparansi berupaya menghilangkan masalah asimetri informasi dalam teori keagenan. Pengambilan keputusan tanpa ada kendala asimetri informasi, akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Hilangnya kondisi asimetri informasi dapat mencegah terjadinya tindakan menyembunyikan aktivitas (moral hazard) dan menyembunyikan informasi (adverse selection).

Beberapa variabel yang memberikan pengaruh terhadap pengungkapan risiko diantaranya adalah keberadaan dewan komisaris independen, keahlian dewan komisaris, keberadaan komite audit, keahlian komite audit dan keberadaan komite manajemen risiko. Keberadaan dewan komisaris independen adalah perbandingan jumlah anggota dewan komisaris yang independen dan keseluruhan anggota dewan komisaris. Keahlian dewan komisaris adalah perbandingan anggota dewan komisaris yang memiliki dasar pendidikan formal dalam salah satu bidang seperti ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan dan hukum dengan jumlah dewan komisaris. Keberadaan komite audit diukur dengan jumlah komite audit. Keahlian komite audit diukur dengan perbandingan anggota komite audit yang memiliki dasar pendidikan formal dalam bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan dan hukum dan jumlah anggota komite audit. Keberadaan komite manajemen risiko adalah adanya struktur komite manajemen risiko pada perusahaan.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan adalah teori utama yang mendasari pengelolaan (manajemen) sebuah perusahaan. Teori keagenan bersangkutan dengan hubungan kontraktual antara anggota sebuah perusahaan atau organisasi. Teori ini lebih lagi berlaku apabila terjadi pembedaan antara pemilik (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), model yang paling banyak digunakan berfokus pada dua individu – prinsipal (atau atasan) agen (atau bawahan) dan dilihat dalam perspektif perilaku dan struktur.

Munculnya masalah keagenan disaat kepentingan prinsipal dan agen tidak selaras dan searah, serta minimnya informasi untuk menilai perilaku agen secara akurat (Eisenhardt, 1989). Dua masalah utama yang timbulkan oleh hubungan keagenan adalah moral hazard dan adverse selection. Moral hazard (aji mumpung) adalah posisi agen kurang berupaya dalam hal hubungan pekerjaan dan dianggap sebagai bentuk perilaku oportunistis meliputi shirking, perk-cunsumption, dan free-riding (Christman et al., 2004). Menurut Kreps (1990), moral hazard didefinisikan sebagai tindakan oleh salah satu pihak (agen) dalam suatu transaksi yang mempengaruhi penilaian pihak lain (prinsipal) terhadap suatu transaksi, tetapi pihak kedua (prinsipal), tidak dapat mengawasi/memaksa secara sempurna tindakan dimaksud.

Dalam penelitian ini menggunakan mekanisme pengawasan didalam mengatasi masalah keagenan. Adanya keberadaan dewan komisaris dan komite merupakan sistem yang diperlukan untuk aktivitas pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan. Mekanisme pengungkapan risiko adalah cara menanggulangi terjadinya asimetri informasi didalam masalah keagenan. Manajer seharusnya membuktikan dan mengkomunikasikan ketersediaan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan mengenai pengelolaan risiko yang dialami perusahaan. Pengungkapan risiko yang andal dan tepat waktu akan menciptakan simetri informasi kepada pemangku kepentingan didalam mengambil keputusan bisnisnya.

### **Pengungkapan Risiko**

Berdasarkan PSAK 60 (2014), mewajibkan entitas untuk menyajikan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi tentang kinerja keuangan entitas dan signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi serta sifat dan cakupan risiko yang muncul dari instrumen keuangan yang terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan upaya entitas mengelola risiko tersebut. Penyajian pengungkapan kualitatif dalam konteks pengungkapan kuantitatif memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk bisa mengkorelasikan pengungkapan-pengungkapan yang telah dipublikasikan. Informasi mengenai sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan akan memberikan pemahaman kepada pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi eksposur risiko entitas dengan lebih baik ketika interaksi antara pengungkapan kualitatif dan kuantitatif menghasilkan pengungkapan informasi yang akurat dan memadai.

Beragamnya pengguna laporan keuangan akan mempengaruhi berapa banyak informasi yang harus diungkapkan didalam laporan keuangan. Menurut FASB (dikutip dari Hendriksen dan Breda, 1992) berpendapat bahwa sebuah laporan keuangan harus mengungkapkan informasi mengenai ekonomi dan aktivitas bisnis yang memberikan pemahaman kepada pengguna laporan. Tingkatan didalam melakukan pengungkapan harus memenuhi prinsip pengungkapan yang memadai (adequate), wajar (fair), dan lengkap (full). Pengungkapan yang memadai adalah laporan keuangan minimalnya telah mengungkapkan informasi yang ada agar tidak menyesatkan. Pengungkapan yang wajar adalah laporan keuangan memberikan perlakuan sama yang bersifat umum bagi semua pengguna laporan keuangan. Pengungkapan lengkap adalah perlunya penyediaan pengungkapan semua informasi yang relevan. Pengungkapan memiliki arti tidak menyembunyikan dan menutupi. Pengungkapan mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi harus memberikan penjelasan yang mewakili keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan. Adanya pengungkapan informasi keuangan maupun non-keuangan yang akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipercaya akan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan.

### **Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Risiko**

Dewan komisaris independen merupakan salah satu faktor penentu untuk memonitor manajer secara efektif dan menekan biaya keagenan. Dewan komisaris independen bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan, kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada direksi. Menurut Htay et al. (2011), keterlibatan dewan komisaris independen bertujuan memantau setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri oleh manajer dan untuk meminimalkan biaya agensi. Teori keagenan menjelaskan bahwa proporsi yang lebih tinggi dari dewan komisaris independen didalam dewan akan menghasilkan pengungkapan yang lebih tinggi dari aspek material perusahaan. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi karena dewan komisaris independen akan dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi.

### **H1: Keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan**

### **Keahlian Dewan Komisaris dan Pengungkapan Risiko**

Tingkat profesionalisme dan pengalaman seorang dewan akan menciptakan keefektifitasan dewan didalam melaksanakan fungsi (Gray dan Nowland, 2013). Agar dapat menjalankan mandatnya secara efektif, dewan komisaris harus memiliki berbagai keterampilan dan keahlian yang sesuai. Dewan komisaris yang memiliki keahlian profesional akan memiliki posisi yang lebih baik

untuk mengidentifikasi masalah risiko yang relevan dan mengungkapkannya didalam laporan tahunan.

## **H2: Keahlian dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan**

### **Komite Audit dan Pengungkapan Risiko**

Komite audit bertindak sebagai mekanisme pemantauan yang efisien untuk meminimalkan biaya agensi dan meningkatkan pengungkapan. Komite audit dapat memainkan peran pengawasan, yang akan mengarah pada peningkatan kualitas informasi yang mengalir antara pemegang saham dan direksi, terutama dalam hal pelaporan keuangan dimana kedua pihak memiliki tingkat informasi yang tidak setara. Peran pengawasan pada komite audit merupakan mekanisme pemantauan dan ikatan yang efektif yang membantu mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham.

## **H3: Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan.**

### **Keahlian Komite Audit dan Pengungkapan Risiko**

Karakteristik dan kualifikasi keahlian anggota komite audit secara positif dengan kualifikasi akuntansi dan pengalaman didalam pengungkapan risiko. Menurut Buckby et al. (2015), kualitas pengungkapan akan menjadi lebih baik ketika menambahkan anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang keuangan. Sifat dan tingkat pengungkapan risiko akan dipengaruhi oleh keterampilan seorang anggota komite audit. Menurut Falendro et al. (2018), latar belakang dan pengalaman kompetensi akuntansi pada komite audit diharapkan dapat menerapkan pengawasan, pengendalian, dan mengadopsi standar akuntabilitas perusahaan secara efektif.

## **H4: Keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan**

### **Komite Manajemen Risiko dan Pengungkapan Risiko**

Pembentukan komite manajemen risiko dipandang sebagai mekanisme untuk meningkatkan pengungkapan informasi terkait risiko (Al-Hadi et al., 2016). Menurut Barakat dan Hussainey (2013), keberadaan komite manajemen risiko akan berinteraksi lebih efektif dan mengkomunikasikan informasi terkait risiko lebih baik dengan pemangku kepentingan yang beragam. Perusahaan dengan lebih banyak sumber daya mungkin memiliki kapasitas yang diperlukan untuk membentuk komite manajemen risiko untuk mengelola risiko organisasi mereka secara efektif dan meningkatkan pelaporan risiko mereka. Keberadaan komite manajemen risiko memberikan fokus pada proses risiko perusahaan. Sehingga memberikan kualitas pemantauan, manajemen, dan pelaporan risiko yang lebih baik.

## **H5: Keberadaan komite manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan**

## **Metode Penelitian**

### **Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko adalah cara penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan akan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Laporan tahunan perusahaan adalah media yang digunakan untuk memuat keseluruhan risiko yang berlangsung di perusahaan. Adanya luas pengungkapan risiko perusahaan yang akurat dan memadai akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan melalui pengelolaan risiko.

Pengungkapan risiko diukur dengan menggunakan metode *content analysis with unweighting disclosure index approach*. Pengukuran dengan pendekatan indeks tidak berbobot akan memberikan skor 1 jika perusahaan mengungkapkan informasi item risiko dan 0 jika tidak diungkapkan. Tabel 3.1 akan menyajikan item-item pengungkapan oleh Achmad et al. (2017) yang diadaptasi dari Linsley dan Shrivies (2006) untuk mengukur pengungkapan risiko.

**Tabel 1**  
**Item-item Pengungkapan Risiko**

Kategori Risiko	Komponen
Risiko Keuangan	1) Tingkat suku bunga 2) Tingkat kurs 3) Komoditas 4) Likuiditas 5) Kredit
Risiko Operasional	6) Kepuasan pelanggan 7) Pengembangan produk 8) Kinerja dan efisiensi 9) Sumber 10) Tingkat keusangan persediaan 11) Kegagalan produk/jasa 12) Lingkungan 13) Keselamatan kerja 14) Penurunan merek produk
Risiko Pemberdayaan	15) Kepemimpinan dan manajemen 16) Outsourcing 17) Insentif kerja 18) Perubahan ketersediaan 19) Komunikasi
Risiko Pemrosesan Teknologi dan Informasi	20) Integritas 21) Akses 22) Ketersediaan 23) Infrastruktur
Risiko Integritas	24) Kebijakan manajemen risiko 25) Kecurangan manajemen dan karyawan 26) Tindakan illegal 27) Reputasi
Risiko Strategik	28) Pemindaian lingkungan 29) Industri 30) Portofolio bisnis 31) Pesaing 32) Penentuan harga 33) Valuasi

- 
- 34) Perencanaan
  - 35) Siklus hidup
  - 36) Pengukuran kinerja
  - 37) Pengaturan
  - 38) Kedaulatan dan politik
- 

Sumber: Achmad et al. (2017) yang diadaptasi dari Linsley dan Shrives (2006)

Indeks pengungkapan risiko merupakan checklist dari item pengungkapan yang berbeda didalam laporan tahunan. Indeks pengungkapan risiko dikembangkan untuk tujuan mengukur jumlah pengungkapan risiko. Indeks tersebut mencakup total 38 item pengungkapan risiko terbagi dalam 6 kategori risiko yaitu risiko keuangan, operasional, pemberdayaan, pemrosesan teknologi dan informasi, integritas, dan strategik. Dengan pengukuran skor setiap item pengungkapan sebagai berikut:

$$\text{Pengungkapan risiko} = \frac{\text{item pengungkapan risiko yang dillakukan perusahaan}}{\text{total item pengungkapan risiko}}$$

Variabel independen yang dalam penelitian ini adalah karakteristik dewan komisaris dan komite audit didalam perusahaan.

1. Dewan Komisaris Independen  
Dewan komisaris independen diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah anggota dewan komisaris independen dan jumlah anggota dewan komisaris seluruhnya.
2. Keahlian Dewan Komisaris  
Keahlian dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan formal dalam salah satu bidang seperti ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan dan hukum terhadap total dewan komisaris.
3. Komite Audit  
Mekanisme pemantauan yang efektif oleh komite audit akan membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Komite audit diukur berdasarkan jumlah komite audit.
4. Keahlian Komite Audit  
Keahlian komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan dan hukum terhadap total anggota komite audit.
5. Komite Manajemen Risiko  
Keberadaan komite manajemen risiko diukur dengan variabel dummy. Diberikan 1 jika perusahaan memiliki komite manajemen risiko dan 0 jika tidak memiliki komite manajemen risiko.

### Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2019. Perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori manufaktur adalah perusahaan yang bergerak disektor industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, dan aneka industri. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan ketentuan;

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2019 merupakan ketentuan sampel yang akan diteliti.
2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan selama 2018-2019 secara lengkap merupakan ketentuan sampel yang akan diteliti.
3. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan menggunakan mata uang Rupiah merupakan ketentuan sampel yang akan diteliti.

### Metode Analisis

Analisis regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model yang digunakan dalam regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, keahlian dewan komisaris, komite audit, keahlian komite audit, dan komite manajemen risiko terhadap pengungkapan risiko. Secara matematis, persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$PR = \alpha + \beta_1DKI + \beta_2KDK + \beta_3KA + \beta_4KKA + \beta_5KMR + \beta_6UK + \beta_7LEV + \beta_8ROE + \varepsilon$$

Keterangan:

PR	: Pengungkapan Risiko
DKI	: Dewan Komisaris Independen
KDK	: Keahlian Dewan Komisaris
KA	: Komite Audit
KKA	: Keahlian Komite Audit
KMR	: Komite Manajemen Risiko
UK	: Ukuran Perusahaan
LEV	: <i>Leverage</i>
ROE	: <i>Return on Equity</i>
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_8$	: Koefisien Regresi
$\varepsilon$	: <i>Error term</i>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2019 merupakan populasi dari penelitian ini. Penelitian ini memperoleh data sebanyak 240 dari 346 perusahaan manufaktur selama 2018-2019 yang akan dijelaskan pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Perolehan Sampel Data**

No	Kriteria	2018	2019	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	171	175	346
2	Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan tahunan selama 2018-2019 secara lengkap	(25)	(29)	(54)
3	Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang bukan Rupiah dalam laporan tahunan	(26)	(26)	(52)
4	Perusahaan yang menjadi sampel	120	120	240
5	<b>Jumlah pengamatan penelitian</b>			<b>240</b>

### Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif memperlihatkan gambaran umum sampel yang digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing variabel dalam sampel. Tabel 3, 4, dan 5 akan menjelaskan hasil uji

statistik deskriptif penelitian ini. Sesuai dengan jumlah data penelitian, hasil uji statistik deskriptif juga menunjukkan 240 data penelitian.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PR	240	0,1315	0,8421	0,3660	0,1406
DKI	240	0,2000	1,0000	0,4198	0,1149
KDK	240	0,0000	1,0000	0,5963	0,2873
KA	240	2,0	5,0	3,025	0,2733
KKA	240	0,0000	1,0000	0,8608	0,2100
UK	240	24,4864	33,4945	28,2673	1,5902
LEV	240	0,0651	3,7444	0,4796	0,3943
ROE	240	-136,4360	1,3996	-0,5272	8,8150

Catatan: Variabel Dependen = PR = Pengungkapan Risiko; Variabel Independen: DKI = Dewan Komisaris Independen; KDK = Keahlian Dewan Komisaris; KA = Komite Audit; KKA = Keahlian Komite Audit; UK = Ukuran Perusahaan; LEV = Leverage; ROE = Return on Equity

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif Kategori Risiko**

Kategori Risiko	2018	2019	Peningkatan Pengungkapan
	Rata-rata Pengungkapan		
Risiko Keuangan	4,1667	4,3	3,10%
Risiko Operasional	2,475	2,6417	6,31%
Risiko Pemberdayaan	1,3417	1,4833	9,55%
Risiko Pemrosesan Teknologi dan Informasi	1,1417	1,2833	11,03%
Risiko Integritas	1,0417	1,0667	2,34%
Risiko Strategik	3,4083	3,4667	1,68%
Total Pengungkapan	13,5751	14,2417	4,68%

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.2, rata-rata indeks pengungkapan risiko dari tahun 2018 hingga 2019 adalah 36,60%, dengan nilai minimum 13,15% dan maksimum 84,21%. Pengungkapan risiko dari tahun 2018 hingga 2019 pada Tabel 4.3 mengalami peningkatan pada setiap kategori jenis risiko. Peningkatan total rata-rata pengungkapan risiko dari 2018 hingga 2019 adalah 4,68%. Besaran peningkatan pengungkapan disetiap jenis risiko adalah risiko keuangan meningkat 3,10%, risiko operasional meningkat 6,31%, risiko pemberdayaan meningkat 9,55%, risiko pemrosesan teknologi dan informasi meningkat 11,03%, risiko integritas meningkat 2,34% dan risiko strategik meningkat 1,68%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan risiko perusahaan manufaktur di Indonesia masih relatif rendah. Rendahnya nilai rata-rata indeks pengungkapan risiko masih dapat membaik jika dilihat dari peningkatan pengungkapan dari 2018 hingga 2019. Hasil deskriptif pada Tabel 4.2 menunjukkan tidak terjadi kesenjangan yang cukup besar dari nilai PR atau sebaran dari variabel data yang kecil pada deskriptif. Dilihat berdasarkan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rerata PR.

Variabel dewan komisaris independen terhadap keseluruhan total anggota dewan komisaris memiliki nilai rata-rata 41%. Nilai minimum jumlah anggota dewan komisaris pada sampel penelitian sebesar 20% dengan nilai maksimum 100%. Ketentuan BEI yang mensyaratkan jumlah minimal dewan komisaris independent sebesar 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris masih belum diterapkan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil deskriptif menunjukkan variabel dewan

komisaris independen bersifat homogen. Tingkat penyimpangan yang rendah dilihat berdasarkan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rerata DKI.

Variabel keahlian dewan komisaris memiliki rata-rata 59%, dengan nilai minimum 0% dan nilai maksimum 100%. Mengindikasikan bahwa adanya keseluruhan dewan komisaris yang ditunjuk tidak memiliki latar belakang pendidikan formal didalam salah satu bidang seperti ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan dan hukum. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat menjelaskan variabel keahlian dewan komisaris secara keseluruhan pada perusahaan sampel.

Variabel komite audit, nilai rata-ratanya adalah 3,02, dengan nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 5,00. Hasil ini menjelaskan bahwa masih ada perusahaan yang belum memenuhi minimalnya jumlah komite audit terdiri atas tiga orang yang diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata komite audit dapat menjelaskan variabel komite audit secara keseluruhan pada perusahaan sampel.

Variabel keahlian komite audit memiliki nilai rata-rata 86%, dengan nilai minimum 0% dan nilai maksimum 100%. Menjelaskan bahwa komite audit perusahaan masih ditemukan keluruhan anggotanya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan dan hukum. Hasil deskriptif menunjukkan tidak terjadi kesenjangan yang cukup besar dari nilai KKA atau sebaran dari variabel data yang kecil pada deskriptif. Dilihat berdasarkan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rerata KKA.

Variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata log natural 28,26, nilai minimum log natural 24,48, nilai maksimum log natural 33,49 dan nilai deviasi standar log natural 1,59. Hasil deskriptif menunjukan nilai rerata ukuran perusahaan dapat mewakili ukuran perusahaan secara keseluruhan sampel. Dilihat berdasarkan nilai rata-rata UK lebih besar dari standar deviasinya.

Variabel *leverage* memiliki rata-rata 47%, nilai minimum 6%, nilai maksimum 0,0374% dan nilai deviasi standar 39%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan mempunyai tingkat hutang yang relatif tinggi. Nilai rerata *leverage* yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai rerata *leverage* dapat mewakili nilai *leverage* secara keseluruhan pada perusahaan yang digunakan sebagai sampel.

Variabel roe memiliki rata-rata -5%, nilai minimum -1,3643%, nilai maksimum 0,0139% dan nilai deviasi standar 0,0881%. Nilai rata-rata dari roe yang lebih kecil dari standar deviasi menunjukkan nilai rerata kinerja perusahaan belum dapat mewakili secara keseluruhan sampel kinerja perusahaan.

Tabel 4.4 akan menampilkan hasil statistik deskriptif untuk variabel yang diukur menggunakan variabel dummy, yaitu variabel komite manajemen risiko. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persentase perusahaan sampel yang menggunakan fungsi komite manajemen risiko.

**Tabel 5**  
**Statistik Deskriptif Variabel Dummy**  
**KMR**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	.0	222	92,5	92,5	92,5
	1.0	18	7,5	7,5	100,0
	Total	240	100,0	100,0	

Berdasarkan tabel 4.4, selama tahun 2018 hingga 2019 diketahui sebanyak 222 perusahaan manufaktur (92,5% dari total sampel) tidak menggunakan fungsi komite manajemen risiko. Sisanya, 18 perusahaan manufaktur (7,5% dari total sampel) menggunakan fungsi komite manajemen risiko.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Cara untuk melihat apakah variabel independen secara individu dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan dapat diperoleh dengan menggunakan uji t. Hasil uji t diperoleh dari tabel *Coefficient*. Tabel 6 akan menjelaskan mengenai hasil dari uji t.

**Tabel 6**  
**Uji Statistik t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,272	0,114		-2,381	0,018
	DKI	-0,004	0,047	-0,004	-0,092	0,927
	KDK	0,031	0,022	0,063	1,401	0,163
	KA	0,022	0,021	0,042	1,025	0,306
	KKA	0,020	0,031	0,030	0,633	0,527
	KMR	0,390	0,022	0,732	17,803	0,000
	UK	0,018	0,003	0,207	5,248	0,000
	LEV	-0,016	0,015	-0,044	-1,083	0,280
	ROE	0,001	0,001	0,033	0,864	0,388

a. *Dependent Variable: PR*

Tabel 6 menunjukkan hasil dari uji t. DKI, KDK, KA, dan KKA sebagai variabel independen dinyatakan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu PR. Probabilitas signifikansi DKI sebesar 0,927, KDK sebesar 0,163, KA sebesar 0,306, dan KKA sebesar 0,527 dan keempatnya jauh diatas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, keahlian dewan komisaris, komite audit, dan keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan variabel KMR signifikan positif pada 0,05 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,00. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan KMR memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan risiko.

Tabel 6 juga menunjukkan pengaruh variabel kontrol terhadap pengungkapan risiko. Variabel LEV dan ROE tidak mempengaruhi pengungkapan risiko dengan probabilitas signifikan sebesar 0,28 dan 0,38. Hal ini berarti LEV dan ROE perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan atas praktik pengungkapan risiko. Kebalikannya, variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Hal ini berarti ukuran perusahaan semakin besar, maka perusahaan mempraktikkan pengungkapan risiko juga semakin luas.

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Risiko**

Analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel keberadaan dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan risiko ( $t = -0,092$  dan  $p\text{-value} = 0,927$ ), namun arah hubungan negatif. Dengan demikian hipotesis 1 tidak diterima. Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian Htay et al. (2011) dan Salem et al. (2019) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Namun hasil ini konsisten dengan temuan Achmad et al. (2017), Khalil dan Maghraby (2017), Falendro et al. (2018), dan Alshirah et al. (2019) menemukan bukti ketidakadaan pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan risiko.

Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan risiko yang lebih besar masih belum ditentukan oleh keberadaan dewan komisaris independen didalam perusahaan manufaktur. Ada dua kemungkinan yang membuat keberadaan dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh signifikan. Pertama, dewan komisaris independen dalam melakukan fungsi pengawasannya tidak terlaksana sepenuhnya. Kedua, regulasi dari OJK yang menyatakan setiap perusahaan publik harus memiliki komisaris independen. Mengakibatkan, pengangkatan seorang dewan komisaris independen pada perusahaan manufaktur diperkirakan hanya sekedar memenuhi aturan tersebut.

### **Pengaruh Keahlian Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko**

Analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel keahlian dewan komisaris memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan risiko ( $t = 1,401$  dan  $p\text{-value} = 0,163$ ), namun arah hubungan positif. Dengan demikian hipotesis 2 tidak diterima karena probabilitas signifikan yang jauh diatas  $\alpha=0,05$ . Arah hubungan hasil penelitian ini sesuai dengan Buckby et al. (2015) dan

Alshirah et al. (2019) yang membuktikan bahwa keahlian dewan komisaris memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur mengungkapkan informasi tentang risiko lebih banyak belum ditentukan oleh keahlian dari dewan komisaris. Secara konsep, tingginya kapabilitas untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan beragam yang terjadi dalam perusahaan, termasuk mengidentifikasi luas dan cakupan potensi risiko yang akan terjadi ditentukan oleh semakin ahli seorang dewan komisaris. Namun sebaliknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris yang memiliki keahlian profesional belum menjamin memiliki posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasikan masalah risiko yang relevan dan mengungkapkannya didalam laporan tahunan.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Risiko**

Analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel keberadaan komite audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan risiko ( $t = 1,025$  dan  $p\text{-value} = 0,306$ ), namun arah hubungan positif. Dengan demikian hipotesis 3 tidak diterima karena probabilitas signifikan yang jauh diatas  $\alpha=0,05$ . Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian Salem et al. (2019) dan Buckby et al. (2015) memberikan bukti bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Namun hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Zhang et al. (2013), Al-Maghzom et al. (2016) dan Falendro et al. (2018), membuktikan keberadaan komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko.

Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan risiko yang lebih banyak belum ditentukan oleh keberadaan komite audit. Mekanisme pemantauan yang efisien oleh komite audit belum berjalan sepenuhnya untuk meminimalkan biaya agensi dan meningkatkan pengungkapan. Hal ini disebabkan minimalnya jumlah komite audit terdiri atas tiga orang yang diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengangkatan komite audit hanya sekedar memenuhi regulasi dari OJK, bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komite audit yang terdiri minimalnya atas tiga orang.

### **Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Risiko**

Analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel keahlian komite audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan risiko ( $t = 0,633$  dan  $p\text{-value} = 0,527$ ), namun arah hubungan positif. Dengan demikian hipotesis 4 tidak diterima karena probabilitas signifikan yang jauh diatas  $\alpha=0,05$ . Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian Buckby et al. (2015) memberikan bukti bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap keluasan pengungkapan risiko perusahaan. Namun hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Zhang et al. (2013) dan Falendro et al. (2018) yang memberikan bukti bahwa keahlian komite audit tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa keahlian dari komite audit belum menjamin bahwa perusahaan untuk mengungkapkan informasi risiko lebih banyak. Secara teori, tingginya kapabilitas untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kompleks yang terjadi dalam perusahaan, termasuk mengidentifikasi luas dan cakupan potensi risiko yang akan terjadi ditentukan oleh semakin ahli seorang komite audit. Namun sebaliknya, latar belakang dan pengalaman kompetensi akuntansi pada komite audit belum menjamin seorang komite audit dapat menerapkan pengawasan, pengendalian, dan mengadopsi standar akuntabilitas perusahaan secara efektif.

### **Pengaruh Komite Manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Risiko**

Analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel keberadaan komite manajemen risiko memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan ( $t = 17,803$  dan  $p\text{-value} = 0,000$ ). Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Al-Hadi et al. (2016) dan Falendro et al. (2018) mendukung bahwa keberadaan komite manajemen risiko dalam perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite manajemen risiko memainkan peran penting dalam mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko lebih banyak. Selain itu, keberadaan komite manajemen risiko juga berperan untuk meningkatkan minat pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan pengendalian melalui pengungkapan informasi risiko. Menurut

Barakat dan Hussainey (2013), keberadaan komite manajemen risiko akan berinteraksi lebih efektif dan mengkomunikasikan informasi terkait risiko lebih baik dengan pemangku kepentingan yang beragam.

Untuk variabel kontrol, hasil analisis menunjukkan bahwa leverage ( $t = -1,083$  dan  $p\text{-value} = 0,280$ ) dan return on equity ( $t = 0,864$  dan  $p\text{-value} = 0,388$ ) berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan risiko. Hubungan negatif tidak signifikan antara leverage terhadap pengungkapan risiko menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang memiliki tingkat leverage yang tinggi tidak mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung untuk lebih mengungkapkan banyak informasi atas tingkat risiko yang lebih besar. Hubungan positif tidak signifikan antara return on equity terhadap pengungkapan risiko menunjukkan perusahaan dengan kinerja yang baik tidak menjamin memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi lebih rinci untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan ( $t = 5,248$  dan  $p\text{-value} = 0,000$ ). Hubungan positif signifikan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi. Perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak kompleksitas dalam hal siklus bisnis mereka. Akibatnya, perusahaan yang lebih besar cenderung meningkatkan kemungkinan dikelolanya peristiwa yang mengancam melalui kinerja perusahaan.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan ulasan yang telah disampaikan diatas, maka dapat dapat disimpulkan: Pertama, variabel keberadaan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Variabel keahlian dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Variabel keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Variabel komite manajemen risiko berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan leverage dan return on equity tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan. Pertama, hasil penelitian ini belum sepenuhnya mendukung peran implementasi tata kelola yang direpresentasikan oleh keberadaan dan keahlian dewan komisaris dan komite dalam mendorong perusahaan untuk lebih banyak mengungkapkan informasi terkait risiko. Kedua, masih ditemukannya proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit yang belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, masih ditemukannya ketiadaan latar belakang pendidikan formal didalam bidang ekonomi dan bisnis bagi dewan komisaris dan komite audit.

### Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya terkait keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dipopulasi lain atau melakukan perluasan untuk mendapatkan sampel yang tidak terbatas sehingga dapat meningkatkan hasil penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kelemahan penelitian ini dengan mempertimbangkan proksi tambahan dari variabel tata kelola perusahaan, sehingga dapat merepresentasikan seluruh elemen dari praktik tata kelola perusahaan.

## REFERENSI

- A Lind, Douglas. 2008. Teknik-teknik Statistika Dalam Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Abraham, S. and Cox, P. 2007. Analysing the determinants of narrative risk information in UK FTSE

- 100 annual reports. *The British Accounting Review*, 39, 227-248.
- Achmad, T., Faisal, F., & Oktarina, M. 2017. Factors Influencing Voluntary Corporate Risk Disclosure Practices by Indonesian Companies. *Corporate Ownership & Control*, 14(3), 286-292. doi:10.22495/cocv14i3c2art2
- Al-Hadi, A., Hasan, M.M. and Habib, A. 2016. Risk committee, firm life cycle, and market risk disclosures. *Corporate Governance: An International Review*, 24(2).
- Ali Khalil and Mona Maghraby. 2017. The determinants of internet risk disclosure: empirical study of Egyptian listed companies. *Managerial Auditing Journal*, 32, 746-767. doi:10.1108/MAJ-04-2016-1370
- Allini, A., Manes Rossi, F. and Hussainey, K. 2016. The board's role in risk disclosure: An exploratory study of italian listed state-owned enterprises. *Public Money & Management*, 36(2).
- Andre Falendro, Faisal, Imam Ghozali. 2018. Karakteristik Dewan Komisaris, Komite, dan Pengungkapan Risiko Perusahaan. *Jurnal Reviu dan Akuntansi Keuangan*, 8, 17-31. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak>
- Anggraeni, L. L. 2019. Pengungkapan Risiko Perusahaan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 dan 2017).
- Azlan Amran, Abdul Manaf Rosli Bin and Bin Che Haat Mohd Hassan. 2009. Risk reporting An exploratory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. *Managerial Auditing Journal*, 24, 39-57. doi:10.1108/02686900910919893
- Bank/A.D.B, A. D. 2000. Corporate Governance and Finance in East Asia: a Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand. Consolidated Report, 1.
- Barakat, A. & Hussainey, K. 2013. Bank governance, regulation, supervision, and risk reporting: Evidence from operational risk disclosures in European banks. *International Review of Financial Analysis*, 30, 254–273.
- Buckby, S., Gallery, G. and Ma, J. 2015. An analysis of risk management disclosures: Australian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 30(8/9).
- Buzby, S.L. 1975. Company size, listed versus unlisted stocks, and the extent of financial disclosure. *Journal of Accounting Research*, 13(1), 16-37.
- Cabedo, D. &. 2004. The Disclosure of Risk in Financial Statements. *Accounting Forum*, 28, 181-200. doi:10.1016/j.accfor.2003.10.002
- Chrisman, James & Chua, Jess. 2004. Comparing the Agency Costs of Family and Non-Family Firms: Conceptual Issues and Exploratory Evidence. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 28, 335- 54.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO). (n.d.). Internal Control-Integrated Framework.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions. 2013. Internal Control-Integrated Framework.
- Daniri, Mas Achmad. 2014. Lead By GCG.
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Eisenhardt, Kathleem. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*(14), 57-74.
- Eng, L. L. & Mak, Y. T. 2003. Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 325–345.
- Fama, Eugene F. and Jensen, Michael C. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law*

- and Economics, 26.
- Felo, A.J. and Solieri, S.A. 2009. Are all audit committee financial experts created equally?. *International Journal of Disclosure and Governance*, 6(2), 150-166.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 (8 ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2020. *25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisni (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gotri, S. K. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017)*.
- Gray, S., Harymawan, I. and Nowland, J. 2014. Political and government connections on corporate boards in australia: Good for business. *Australian Journal of Management*, 41(1).
- Gubernur Bank Indonesia. 2012. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank*.
- Hassaan, M. 2013. The influence of corporate governance structures on compliance with mandatory IFRSs disclosure requirements in the Jordanian context. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 2(3), 14-26.
- Hendriksen, E. S., dan M. F. Breda. 1992. *Accounting Theory (5th Edition: Richard D. ed.)*.
- Htay, S.N.N., Rashid, H.M.A., Adnan, M.A. and Mydin, M.A.K. 2011. Corporate governance and risk management information disclosure in malaysian listed banks: Panel data analysis. *International Review of Business Research Papers*, 7(4).
- ICAEW. 2011. *Reporting Business Risks: Meeting Expectations*. Institute of Chartered Accountants of English and Wales.
- Imani, S. 2017. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Risiko*. Indonesia, I. A. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Instrumen Keuangan: Pengungkapan*.
- Issal Haj Salem, S. D. 2019. Corporate governance and risk disclosure quality: Tunisian evidence. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Vol. 9 No. 4, 2019, 567-602. doi:DOI 10.1108
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kuangan, D. K. 2006. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006*.
- Khaled Samahaa, Hichem Khlif, dan Khaled Hussaineyc. 2015. The impact of board and audit committee characteristics on voluntary disclosure: A meta-analysis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 24, 13-28.
- Linsley, P. M., Shrivs, P. J., dan Crumpton, M. 2003. *Risk Disclosure Practices : A Study of UK and Canadian banks*. Working paper.
- Linsmeier, T. J., Thornton, D. B., Venkatachalam, M., dan Welker, M. 2002. The effect of mandated Market Risk Disclosures on Trading Volume Sensitivity to Interest Rate, Exchange Rate, and Commodity Price Movements. *The Accounting Review*, 343-377.
- Lukviarman, N. 2016. *Corporate Governance Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi Di Indoensia*. (R. N. Hamidawati, Ed.) Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Malek Hamed Alshirah, A. A. 2019. Board of directors' characteristics and corporate risk disclosure: the moderating role of family ownership. *EuroMed Journal of Business*, 1450-2194. doi:10.1108/EMJB-09-2019-0115
- Mangena, M. and Pike, R. 2005. The effect of audit committee shareholding, financial expertise and size on interim financial disclosures. *Accounting and Business Research*, 35(4).
- Miihkinen, A. 2013. The Usefulness of Firm Risk Disclosures under Different Firm Riskiness, Investor Interest, and Market Conditions? Evidence from Finland. *Advances in Accounting*, 29. doi:10.1016/j.adiac.2013.09.006.
- Mousa, G.A. and Elamir, E.A.H. 2014. The effect of governance mechanisms on the quality of risk disclosure: using bootstrap techniques. *American J. Finance and Accounting*, 3, 25-27.
- Philip M. Linsley, P. J. 2005. Transparency and the disclosure of risk information in the banking sector. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 13(3), 205-214.
- Philip M. Linsley, P. J. 2006. *Risk Reporting: A Study of Risk Disclosures in the Annual Reports of UK Companies*. *The British Accounting Review*, 38, 387-404.

- Presiden Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Rahardjo, S. S. 2018. Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan. (G. S. P.G., Ed.) Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ridhima Saggat and Balwinder Singh. 2017. Corporate governance and risk reporting: Indian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 32, 378-405. doi:10.1108/MAJ-03-2016-1341
- Scott, T.W. 1994. Incentives and disincentives for financial disclosure: voluntary disclosure of defined benefit pension plan information by Canadian firms. *The Accounting Review*, 69(1), 26-43.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (2 ed.). New York: John Willey & Sons, Inc.
- Setyarini, Y. I. 2011. Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risk Management Comitte.
- Singhvi, S. S. & Desai, H. B. 1971. An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure. *The Accounting Review*, 46, 129-138.
- Subramaniam, N., McManus, L. and Zhang, J. 2009. Corporate governance, firm characteristics and risk management committee formation in australian companies. *Managerial Auditing Journal*, 24.
- Thomas J. Linsmeier, D. B. 2002. The Effect of Mandated Market Risk Disclosures on Trading Volume Sensitivity to Interest Rate, Exchange Rate, and Commodity Price Movement. *The Accounting Review*, 77(2), 343-377.
- Utomo, Y. 2014. Determinan Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan Nonkeuangan Di Indonesia. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, i-44.
- Wardhana, A. A. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko (Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
- Zeghal, D., Mouelhi, R. and Louati, H. 2007. An analysis of the determinants of research and development voluntary disclosure by Canadian firms. *The Irish Accounting Review*, 14(2), 61-89.
- Zhang, X., Taylor, D., Qu, W. and Oliver, J. 2013. Corporate risk disclosures: Influence of institutional shareholders and audit committee. *Corporate Ownership & Control*, 10(4).